



## **Curriculum Reform in Brunei Darussalam's Education System in Realizing Brunei Vision 2035**

**Roby Setyawan<sup>1</sup>, Helmiati<sup>2</sup>, Muhammad Nazir<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [rob.setyawan28@gmail.com](mailto:rob.setyawan28@gmail.com)<sup>1</sup>, [helmiati@uin-suska.ac.id](mailto:helmiati@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>, [m.nazir@uin-suska.ac.id](mailto:m.nazir@uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

Curriculum reform in Brunei Darussalam is a strategic step in supporting the national vision, Brunei Vision 2035, which aims to build a well-educated, highly skilled society with the highest standard of living. This transformation is reflected through the implementation of the 21st Century National Education System (SPN21), which focuses on competency development, technology integration, character education, and the application of a bilingual curriculum. The reform encompasses not only primary and secondary education levels but also vocational and higher education, with active involvement from both the business sector and the government. Through this approach, Brunei strives to produce a generation that excels academically and is well-equipped to face global challenges with competence and integrity.

**Keywords: Curriculum Reform, SPN21, Brunei Education, Brunei Vision 2035**

### **PENDAHULUAN**

Brunei Darussalam telah menetapkan Brunei Vision 2035 sebagai panduan pembangunan nasional, dengan tujuan utama membentuk masyarakat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran, dan berdaya saing global. Untuk mencapai visi tersebut, reformasi kurikulum pendidikan menjadi langkah strategis yang krusial. Artikel ini bertujuan menganalisis langkah-langkah reformasi kurikulum yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam, dengan fokus pada penerapan sistem pendidikan berbasis kompetensi, integrasi nilai-nilai Islam, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu negara, termasuk Brunei Darussalam yang menempatkan pendidikan sebagai pilar penting dalam mencapai visi nasionalnya, yaitu Visi Brunei 2035. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan reformasi kurikulum pendidikan secara menyeluruh agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan global. Reformasi ini bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter kuat serta keterampilan abad ke-21. (Syukron Darsyah, 2023)



Salah satu pendekatan utama dalam reformasi kurikulum di Brunei adalah penerapan sistem pendidikan berbasis kompetensi (Competency-Based Education). Pendekatan ini menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu oleh peserta didik sebagai hasil pembelajaran, bukan semata-mata pada waktu belajar atau isi kurikulum. Dengan demikian, siswa didorong untuk menguasai keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, nilai-nilai Islam juga menjadi aspek penting yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di Brunei Darussalam. Sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan berlandaskan ajaran Islam, Brunei berkomitmen menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam seluruh proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk membentuk pelajar yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kepribadian yang berlandaskan pada ajaran agama.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan turut menjadi bagian penting dari reformasi yang dilakukan. Pemerintah Brunei menyadari bahwa teknologi digital berperan besar dalam membentuk cara belajar generasi muda saat ini. Oleh karena itu, berbagai inovasi seperti penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform pembelajaran daring, dan smart classroom mulai diterapkan guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Reformasi ini juga mencakup pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik. Guru dituntut untuk tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga mampu mengimplementasikan metode pengajaran yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital. Dalam konteks ini, pemerintah secara aktif menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang dinamis.

Hasil dari reformasi kurikulum ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi akademik siswa, tetapi juga memperkuat karakter mereka sebagai warga negara yang produktif dan bertanggung jawab. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual menjadi fokus utama dalam mencetak generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

Dengan strategi reformasi yang holistik ini, Brunei Darussalam menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan transformatif. Visi Brunei 2035 menjadi landasan yang mengarahkan setiap langkah perubahan menuju pencapaian masyarakat yang maju, sejahtera, dan bermartabat, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai kebijakan pendidikan nasional.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Proses ini mencakup telaah mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan, baik berupa artikel, buku, dokumen, maupun sumber lainnya. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara sistematis untuk menguraikan pembahasan yang selaras dengan tema penelitian. Fokus utama kajian ini adalah reformasi kurikulum pendidikan Brunei Darussalam dalam mewujudkan visi Brunei 2035. Sumber utama yang digunakan dalam studi ini artikel jurnal nasional dan internasional, serta referensi lainnya dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan analisis wacana dari artikel jurnal ilmiah, buku, serta literatur lainnya yang relevan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Brunei Darussalam

Brunei Darussalam secara geografis berada di kawasan Asia Tenggara, dengan Laut Cina Selatan membentang di sisi utaranya. Di sisi timur, selatan, dan barat, negara ini berbatasan langsung dengan wilayah Serawak, salah satu negara bagian Malaysia. Secara astronomis, Brunei terletak antara 4 hingga 5 derajat Lintang Utara serta 114 hingga 115 derajat Bujur Timur. Negara ini memiliki total luas wilayah sekitar 5.765 kilometer persegi. (Sulthoni Alfathon, dkk., 2025)

Sekitar dua pertiga penduduk Brunei Darussalam, yakni sekitar 66,3%, berasal dari etnis Melayu yang menjadi kelompok mayoritas. Kelompok minoritas terbesar adalah etnis Tionghoa (Han), yang jumlahnya sekitar 11,2% dari populasi dan dikenal memiliki peran penting dalam sektor ekonomi negara. Selain itu, terdapat masyarakat Dayak sebagai penduduk asli yang mencakup 3,4%, serta kelompok etnis lain yang secara keseluruhan menyumbang sekitar 19,1% dari populasi.

Keberagaman etnis ini juga tercermin dalam penggunaan bahasa. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa resmi, sementara bahasa Tionghoa juga cukup umum digunakan. Bahasa Inggris banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama karena keberadaan komunitas ekspatriat yang cukup signifikan, termasuk warga negara dari Inggris dan Australia.

Dalam hal agama, Islam adalah agama resmi yang dianut oleh mayoritas penduduk (67%), dan Sultan Brunei menjabat sebagai kepala negara sekaligus pemimpin tertinggi umat Islam di negara tersebut. Di samping itu, ada pula penganut agama Buddha (13%), Kristen (10%), serta kepercayaan tradisional yang dianut oleh sebagian kecil komunitas pribumi (sekitar 10%).

Brunei menganut sistem monarki absolut berdasarkan hukum Islam. Sultan Hassanal Bolkiah menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, merangkap perdana menteri dan menteri pertahanan. Pemerintahan dibantu oleh dewan penasihat dan kabinet, di mana peran Sultan sangat dominan. Media dikelola untuk mendukung stabilitas kerajaan.

Brunei memiliki ekonomi kecil namun makmur, bergantung pada produksi minyak bumi dan gas alam yang menyumbang hampir setengah dari PDB. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis dan subsidi kebutuhan dasar. Untuk masa depan, Brunei fokus pada diversifikasi ekonomi melalui sektor perdagangan, industri, perbankan, dan pariwisata, serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengurangan pengangguran.

Brunei Darussalam, sebuah negara kecil namun kaya, memiliki perekonomian yang menggabungkan perdagangan domestik dan internasional, regulasi pemerintah, program kesejahteraan, serta tradisi desa. Produksi minyak dan gas alam merupakan kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyumbang sekitar 46,7% pada tahun 2024. Selain itu, pendapatan dari investasi luar negeri yang dikelola oleh Brunei Investment Agency (BIA) turut memperkuat ekonomi negara ini. (Athoillah & Afina, 2020)

Meskipun wilayahnya tidak seluas Malaysia atau Indonesia, Brunei Darussalam memiliki posisi strategis sebagai kerajaan Islam yang konsisten menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakatnya. Dikenal juga sebagai Kerajaan Melayu

Islam Beraja (MIB), Brunei menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara. Saat ini, hampir seluruh penduduk asli Brunei menganut agama Islam. Sementara itu, dari kalangan pendatang yang berasal dari negara seperti Filipina, India, dan Tiongkok, sekitar 40% di antaranya juga memeluk Islam.

Perkembangan agama Islam di Brunei mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, sultan kelima dalam sejarah Brunei. Di bawah kepemimpinannya, kekuasaan Brunei mencakup wilayah yang sangat luas, termasuk seluruh Pulau Kalimantan, Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Balabac, Banggi, Balambangan, Matanani, serta wilayah utara Pulau Palawan hingga mencapai Manila. Masa pemerintahannya menjadi tonggak penting bagi kemajuan syiar Islam di kawasan tersebut. (Wasih dan Fitri, 2022)

Walaupun secara geografis Brunei Darussalam jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangganya seperti Malaysia dan Indonesia, peranannya dalam menjaga dan meneguhkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat sangatlah signifikan. Negara ini menganut sistem monarki Islam dan dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB), sebuah konsep yang menjadikan Islam sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep MIB menekankan tiga pilar utama: ketaatan rakyat kepada raja, pengamalan ajaran Islam sebagai prinsip hidup, dan pelestarian identitas Melayu secara utuh. Hal ini mencakup penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan simbol utama identitas nasional Brunei. (Aslan & Suhari, 2019)

## 2. *Brunei Vision 2035*

*Brunei Vision 2035* adalah visi jangka panjang yang diluncurkan oleh Brunei Darussalam pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mentransformasi negara menjadi masyarakat yang berpendidikan tinggi dan terampil sesuai dengan standar internasional tertinggi, negara dengan kualitas hidup yang tinggi, termasuk dalam 10 besar dunia, ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan, dengan pendapatan per kapita termasuk dalam 10 besar dunia. (Suyanti Adi Pawiro, 2021)

Visi ini bertujuan untuk menjadikan Brunei sebagai negara yang diakui secara global dalam tiga aspek utama: (1) Pendidikan dan Keterampilan: Mewujudkan masyarakat Brunei yang berpendidikan tinggi, terampil, dan berprestasi, sesuai dengan standar internasional tertinggi, (2) Kualitas Hidup: Menjamin kualitas hidup yang tinggi bagi seluruh rakyat Brunei, termasuk dalam aspek kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial., (3) Ekonomi Dinamis dan Berkelanjutan: Membangun ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan, dengan pendapatan per kapita yang termasuk dalam sepuluh besar dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Brunei menerapkan pendekatan "Whole-of-Nation", yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Brunei Darussalam adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut dengan pijakan utama pada prinsip-prinsip syariat Islam. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, yang tidak hanya berperan sebagai Kepala Negara, tetapi juga memegang jabatan sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, sekaligus pemimpin pemerintahan secara keseluruhan, dengan dukungan dari Dewan Penasihat Kesultanan serta sejumlah menteri lainnya. Negara ini juga terkenal karena kekayaannya yang melimpah, yang menjadi faktor utama

dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam sektor pendidikan, seluruh kebijakan diarahkan oleh kurikulum nasional yang dirancang untuk menghasilkan individu yang religius, berakhlak mulia, serta mampu bersaing dalam bidang teknologi. Pemerintah Brunei menetapkan tiga pilar utama dalam kebijakannya: penerapan sistem dua bahasa di setiap institusi pendidikan, pengintegrasian nilai-nilai Melayu Islam Beraja (MIB) ke dalam kurikulum, serta pengembangan sumber daya manusia yang mencakup pendidikan vokasi atau kejuruan. (Maunah, 2018)

*Brunei Vision 2035* merupakan cetak biru pembangunan jangka panjang yang dirancang sebagai panduan strategis negara, diprakarsai oleh Sultan Hassanal Bolkiah selaku Perdana Menteri Brunei Darussalam. Gagasan ini mulai digagas sejak tahun 2004 ketika dibentuk Dewan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang atas persetujuan Sultan, yang bertanggung jawab menyusun visi masa depan Brunei serta merumuskan kebutuhan teknis, anggaran, dan strategi untuk mencapainya. Dewan ini menghimpun aspirasi rakyat Brunei yang menginginkan stabilitas politik, pelestarian nilai budaya dan spiritual, serta kesiapan menghadapi tantangan global secara bijak dan terarah demi menjamin masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Hasil kerja dewan tersebut dirangkum dalam dokumen resmi yang diluncurkan pada tahun 2007 dan diberi nama "*Brunei Vision 2035*". Visi ini menggambarkan ambisi Brunei untuk menjadi negara yang diakui dunia karena kualitas sumber dayanya yang unggul dalam pendidikan dan keterampilan dengan standar internasional, memiliki taraf hidup tinggi yang masuk 10 besar dunia, serta didukung oleh perekonomian yang kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global dengan pendapatan per kapita tertinggi.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah membentuk Majelis Tertinggi *Brunei Vision 2035* pada tahun 2014. Lembaga ini bertugas memastikan implementasi berbagai program strategis oleh instansi pemerintah berjalan efektif dan konsisten. Majelis ini juga mengawasi pelaksanaan 13 strategi kunci pembangunan nasional, mencakup sektor pendidikan, ekonomi, keamanan, kelembagaan, bisnis lokal, infrastruktur, kesejahteraan sosial, lingkungan, kesehatan, keagamaan, tata ruang, teknologi informasi dan komunikasi, serta perencanaan tenaga kerja.

Dalam seluruh kerangka besar ini, pendidikan menempati posisi terdepan sebagai pilar utama pembangunan. Pemerintah Brunei menaruh perhatian besar dalam menyempurnakan sistem pendidikan nasional, termasuk dalam hal pembaruan dan penyesuaian kurikulum agar sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam *Brunei Vision 2035*. (Syukron Darsyah, 2023)

### 3. Kurikulum Pendidikan Brunei Darussalam

Di Brunei Darussalam, pendidikan menjadi prioritas utama dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah menerapkan kebijakan strategis seperti pendidikan gratis hingga tingkat menengah dan kurikulum nasional yang mencakup bahasa, sains, matematika, dan pendidikan Islam. Mutu pendidikan ditingkatkan melalui pelatihan guru, pembaruan kurikulum, dan perbaikan infrastruktur. Pemanfaatan teknologi digital juga didorong untuk mendukung proses belajar mengajar. Pendidikan agama, khususnya Islam, menjadi fondasi penting dan diajarkan sejak dini. Di tingkat perguruan tinggi, institusi seperti Universiti Brunei Darussalam (UBD) dan Institut Teknologi Brunei (ITB) dikembangkan untuk menghasilkan lulusan berkualitas global. Pendidikan vokasional disiapkan untuk mencetak tenaga kerja terampil, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda digalakkan melalui berbagai program dan kegiatan serta berakar kuat pada nilai-nilai budaya serta agama. (Ika Kurnia Sofiani, dkk., 2024)

Kurikulum sekolah di Brunei Darussalam mengadopsi pendekatan berbasis mata pelajaran (subject-oriented). Jumlah mata pelajaran yang diberikan bervariasi tergantung jenjang pendidikan, yaitu sekitar 7 hingga 9 mata pelajaran mulai dari jenjang prasekolah hingga sekolah menengah. Sementara itu, untuk tingkat pre-universitas, siswa mempelajari hingga 12 mata pelajaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan kurikulum untuk pendidikan vokasi di Brunei mengalami peningkatan dengan menyesuaikan materi ajar pada standar kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Implementasi hasil pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini kini sedang berlangsung di sekolah-sekolah kejuruan, dengan pemantauan yang dilakukan secara kolaboratif antara pihak sekolah dan mitra industri.

Salah satu aspek menarik dari sistem pendidikan Brunei adalah pengenalan Bahasa Inggris sejak usia dini, dimulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai 3 pada tingkat sekolah dasar (lower primary). Sementara itu, sistem dwibahasa mulai diterapkan secara formal pada jenjang kelas 4 hingga kelas 6 sekolah dasar dan berlanjut hingga sekolah menengah atas (upper secondary). Walaupun demikian, terdapat sejumlah mata pelajaran yang tetap diajarkan menggunakan Bahasa Melayu, seperti Pendidikan Agama Islam, Seni dan Kerajinan, serta mata pelajaran yang berkaitan dengan konsep Melayu Islam Beraja (MIB). Sebaliknya, mata pelajaran seperti Matematika, Sejarah, Sains, dan Geografi disampaikan dalam Bahasa Inggris. (Sulthoni Alfathon, dkk., 2025)

Dalam bidang pendidikan, fokus utama pemerintah adalah membentuk sumber daya manusia yang berakhlak, religius, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sistem pendidikan formal di negara ini dimulai pada tahun 1912 dengan pendirian Sekolah Melayu di Bandar Brunei, yang kini dikenal sebagai Bandar Seri Begawan. Selanjutnya, sekolah-sekolah baru didirikan di daerah Brunei Muara, Kuala Belait, dan Tutong. Bahkan sebelumnya, pada tahun 1916, komunitas Tionghoa telah membuka sekolah mereka sendiri di kawasan Bandar Seri Begawan.

Perkembangan pendidikan berlanjut dengan dibukanya Sekolah Melayu tingkat menengah di Belait pada tahun 1966. Kemudian, pendidikan taman kanak-kanak mulai diperkenalkan sebagai bagian dari pendidikan dasar pada tahun 1979. Universiti Brunei Darussalam, sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama di negara ini, resmi berdiri pada tahun 1985. Sejak Brunei merdeka pada tahun 1984, diterapkan kurikulum nasional yang mewajibkan penguasaan dua bahasa oleh para siswa, yaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris. Bahasa Melayu digunakan untuk mengajar mata pelajaran seperti Bahasa Melayu, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Jasmani, Seni Lukis, dan Keterampilan Tangan. Sementara itu, Bahasa Inggris digunakan dalam pengajaran sains, matematika, geografi, sejarah, dan bahasa Inggris itu sendiri. (Sulthoni Alfathon, dkk., 2025)

Kebijakan pendidikan Brunei diarahkan untuk membentuk generasi yang religius dan memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, serta mampu menjadi panutan di tengah masyarakat. Visi pemerintah adalah menciptakan masyarakat Brunei yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia.

Mulai tahun 2008, Brunei melangkah ke sistem pendidikan baru yang dikenal sebagai SPN21 (Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21). SPN21 dirancang untuk memberikan ruang bagi siswa mengembangkan potensi akademiknya sesuai kemampuan masing-masing, sejalan dengan misi Kementerian Pendidikan Brunei yang ingin menyediakan pendidikan menyeluruh agar setiap individu dapat mencapai kapasitas terbaiknya. Sistem ini mulai diterapkan kepada siswa tingkat menengah pertama (tahun ke-7) pada tahun ajaran 2008, dimulai dari lulusan ujian PSR (setara ujian akhir SD) tahun 2007. Transisi sistem ini juga diperluas ke tingkat dasar, dimulai dari siswa tahun ke-1 dan ke-4 pada 2009, dan ketika itu direncanakan akan sepenuhnya diterapkan di semua jenjang dasar pada tahun 2011. (Sulthoni Alfathon, dkk., 2025)

#### 4. Kurikulum SPN21

Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 (SPN21) yang diperkenalkan pada tahun 2008 menjadi tonggak awal reformasi kurikulum di Brunei. SPN21 bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Transformasi ini mencakup penguatan literasi dasar, peningkatan kualitas guru, dan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. (Syukron Darsyah, 2023)

Sejak tahun 2008, Brunei Darussalam telah memulai perubahan menuju sistem pendidikan baru yang dikenal dengan nama SPN21, singkatan dari *Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21*. Sistem ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam jalur pendidikan serta memastikan setiap siswa dapat meraih jenjang pendidikan tertinggi sesuai dengan potensi dan kemampuan akademis masing-masing. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan (*Ministry of Education/ MoE*) Brunei yang bertujuan menyediakan pendidikan yang komprehensif guna mengoptimalkan potensi seluruh peserta didik. (Hasbi Abduh, 2016)

Implementasi awal SPN21 dimulai pada tahun ajaran 2008, diterapkan kepada siswa tingkat menengah pertama (tahun ke-7), khususnya mereka yang telah menyelesaikan Ujian PSR tahun 2007, yang setara dengan ujian akhir sekolah dasar. Selanjutnya, pada tahun 2009, transisi ke sistem baru ini diperluas kepada siswa tahun pertama dan tahun keempat tingkat dasar. (Amran Khaidir Fadil & Suhendra, 2016)

##### a. Pendidikan pada Tingkat Pra-Dasar

Pendidikan anak usia dini di Brunei Darussalam dimulai pada usia lima tahun, meskipun beberapa lembaga pra-sekolah swasta menerima anak-anak yang berusia di bawah tiga tahun. Pendidikan pada jenjang ini bersifat persiapan menuju pendidikan dasar dan memiliki kurikulum yang dirancang untuk mendukung perkembangan holistik anak.

Materi pembelajaran mencakup pengenalan bahasa dasar dan aritmatika, pemahaman kewarganegaraan, pengenalan terhadap ajaran dasar agama Islam, pendidikan jasmani, serta pengembangan potensi dan bakat anak. Seluruh mata pelajaran disampaikan dengan pendekatan kontekstual, menggunakan unsur lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran.

Metode pembelajaran di tingkat ini bersifat fleksibel, tanpa pembagian waktu yang kaku untuk setiap mata pelajaran. Aktivitas pembelajaran diarahkan melalui berbagai kegiatan bermain dan eksplorasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Hal ini bertujuan untuk membangun dasar kognitif, afektif, dan psikomotorik yang kuat sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar formal.

### **b. Pendidikan pada Tingkat Dasar**

Dalam kerangka SPN21, pendidikan dasar di Brunei Darussalam terbagi menjadi dua jenjang, yaitu tingkat dasar bawah (tahun 1) dan tingkat dasar atas (hingga tahun 6). Seluruh siswa mengikuti kurikulum yang seragam dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Bagi siswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke sekolah Arab, mereka diwajibkan mengikuti seleksi masuk yang diadakan pada tahun keempat. Setelah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan dasar, baik siswa sekolah umum maupun sekolah Arab akan menempuh Ujian Penilaian Sekolah Rendah (PSR) sebagai syarat untuk melanjutkan ke tingkat menengah. (Muhammad Yusran, 2019)

### **c. Pendidikan pada Tingkat Menengah**

Dalam sistem SPN21, pendidikan menengah di Brunei Darussalam berlangsung selama 4 hingga 5 tahun. Seluruh siswa mengikuti kurikulum yang seragam pada tahun ke-7 dan ke-8. Di akhir tahun ke-8, mereka mengikuti Ujian Penilaian Menengah Bawah, yang berfungsi untuk menilai kemajuan akademik siswa hingga tahun ketiga tingkat menengah bawah. Berdasarkan hasil evaluasi ini, siswa akan diarahkan ke jalur pendidikan menengah umum selama 4 atau 5 tahun.

Selain jalur reguler, tersedia pula program khusus yang dirancang untuk siswa dengan bakat luar biasa di bidang olahraga, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa. Pemerintah juga menyediakan layanan pendidikan inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, keterbatasan fisik, disabilitas intelektual, atau kesulitan belajar tertentu.

Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk berpindah antara program pendidikan 4 tahun dan 5 tahun, dengan syarat mempertimbangkan capaian akademik dan ketentuan yang berlaku. Sebagai penutup masa studi, siswa akan mengikuti ujian *Brunei-Cambridge GCE O-Level* pada akhir tahun ke-10 untuk program 4 tahun, atau pada akhir tahun ke-11 bagi mereka yang menempuh jalur 5 tahun.

### **d. Pasca Pendidikan menengah**

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, para siswa di Brunei Darussalam memiliki beberapa pilihan jalur pendidikan lanjutan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi akademik mereka. Dua jalur utama yang tersedia adalah:

#### **1) Kolese Teknik (*Technical Colleges*)**

Kolese teknik di Brunei menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada keterampilan praktis dan kejuruan. Institusi ini dirancang untuk membekali lulusan dengan kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia nasional yang terampil dan siap pakai. Program yang ditawarkan mencakup berbagai bidang seperti teknik mesin, listrik, informasi dan teknologi, serta layanan profesional lainnya.

#### **2) Sekolah Kejuruan (*Vocational Schools*)**

Sekolah kejuruan merupakan institusi pendidikan lanjutan yang mengedepankan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (*competency-based training*). Kurikulumnya dirancang agar peserta didik memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, terutama industri lokal dan nasional. Pendidikan di sekolah ini menekankan pada pelatihan langsung dan kerja

praktik, serta menjalin kemitraan erat dengan sektor industri untuk memastikan lulusan siap kerja.

Kedua jalur ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan Brunei Darussalam dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keahlian vokasional yang aplikatif. (Sulthoni Alfathon, 2025)

#### e. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Brunei Darussalam merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dalam berbagai bidang. Pemerintah melalui berbagai institusi pendidikan tinggi menyediakan program akademik dan vokasional yang relevan dengan tuntutan pembangunan nasional. Adapun institusi pendidikan tinggi utama di Brunei meliputi:

##### 1) *Technical and Engineering Colleges*

Institusi seperti Sultan Saiful Rijal Technical College dan Jefri Bolkiah College of Engineering merupakan lembaga pendidikan tinggi pasca-sekolah menengah yang memberikan pelatihan teknis dan profesional. Lembaga ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional, terutama dalam sektor-sektor industri. Selain menasar lulusan sekolah menengah, kedua kolese ini juga melayani pelatihan lanjutan bagi para pekerja dewasa.

##### 2) *Perguruan Tinggi Keperawatan Pengiran Anak Puteri Rashidah*

Institusi ini merupakan pusat pendidikan tersier dalam bidang keperawatan dan kebidanan. Program yang ditawarkan mencakup diploma pra-registrasi, program konversi, dan diploma tingkat lanjut. Tujuan utama lembaga ini adalah mencetak perawat profesional yang memiliki kompetensi klinis dan keilmuan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan nasional.

##### 3) *Institut Teknologi Brunei (ITB)*

ITB dibentuk untuk memberikan pelatihan praktis berbasis luas pada tingkat Higher National Diploma (HND). Lembaga ini menawarkan berbagai program di bidang bisnis dan keuangan, sistem informasi dan komputasi, komunikasi dan sistem komputer, teknik kelistrikan, serta layanan teknik bangunan. ITB juga membuka peluang pelatihan profesional dan kursus jangka pendek sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

##### 4) *Universitas Brunei Darussalam (UBD)*

UBD merupakan universitas nasional pertama dan utama di Kesultanan Brunei. Sejak pendiriannya, UBD telah mengalami perkembangan signifikan dengan menawarkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu pengetahuan alam, bisnis, ekonomi, kebijakan publik, teknik, kedokteran, dan ilmu sosial. Salah satu unit penting di bawah UBD adalah Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education (SHBIE), yang berfungsi sebagai fakultas keguruan dan pelatihan pendidikan. SHBIE bertanggung jawab dalam mencetak tenaga pendidik profesional melalui program pelatihan guru dan pendidikan lanjutan. (Alfathon, S., Mislaini, & Fajri, K., 2024)

## 5. Integrasi Nilai Melayu Islam Beraja (MIB) dalam Kurikulum Nasional

Nilai-nilai Melayu Islam Beraja (MIB) menjadi landasan filosofi dalam sistem pendidikan Brunei. Integrasi MIB dalam kurikulum bertujuan membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Hal ini tercermin dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung penguatan nilai-nilai tersebut. (Syukron Darsyah, 2023)

Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan falsafah negara Brunei Darussalam yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah ini secara resmi dijadikan dasar negara sejak kemerdekaan Brunei pada tahun 1984. MIB terdiri dari tiga unsur utama: Melayu, Islam, dan Beraja, yang masing-masing memiliki nilai-nilai fundamental yang membentuk identitas nasional Brunei. Falsafah MIB diimplementasikan dalam berbagai bidang, termasuk kurikulum pendidikan, penyiaran, hukum, dan kegiatan sosial. Pendidikan MIB bahkan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah untuk membentuk karakter nasional yang kuat dan selaras dengan cita-cita negara Brunei Vision 2035

### a. Nilai Melayu

Nilai Melayu dalam MIB menekankan pada budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat Melayu. Ia mencakup nilai-nilai sopan santun, hormat-menghormati, musyawarah, dan semangat gotong royong. Budaya Melayu dianggap sebagai warisan bangsa yang harus dilestarikan, termasuk dalam sistem pendidikan, hukum, dan kehidupan sosial.

### b. Nilai Islam

Islam sebagai agama resmi negara menjadi pusat falsafah MIB. Nilai-nilai Islam yang ditekankan meliputi tauhid, syariat Islam, akhlak mulia, keadilan, dan amanah. Negara Brunei menerapkan prinsip Islam dalam pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari, termasuk pelaksanaan hukum syariah secara bertahap.

### c. Nilai Beraja

Nilai Beraja menunjukkan sistem monarki absolut yang dipimpin oleh Sultan sebagai kepala negara dan agama. Ketaatan kepada raja (wali al-amr) dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada perintah Islam. Sultan dianggap sebagai pelindung agama dan budaya, serta pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjaga kemaslahatan rakyat. (Muhd. Abdul Afiq & Mahayuddin, 2018)

## 6. Perubahan dalam SPN21

Implementasi Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 (SPN21) di Brunei Darussalam mencakup perubahan signifikan pada struktur dan sistem pendidikan, kurikulum, penilaian, serta pendidikan teknikal. Pelaksanaan SPN21 ini direncanakan selesai pada tahun 2015. Perubahan ini menekankan pada pendidikan berkualitas melalui kurikulum yang seimbang, relevan, dinamis, dan berbeda, sejalan dengan *Brunei Vision 2035*. (Masuriyati & Che Zarrina, 2015)

Struktur sistem pendidikan SPN21 telah disusun dan diselaraskan untuk semua jenjang dan kelompok pelajar, dengan menyediakan Program Pendidikan Khusus bagi pelajar berbakat atau memiliki kecerdasan tinggi, serta Program Pendidikan Berkebutuhan Khusus bagi pelajar dengan keterbatasan penglihatan, tantangan mental dan fisik, serta kesulitan pembelajaran spesifik. Melalui SPN21, pelajar diberikan kesempatan untuk memilih mengikuti Program Pendidikan Menengah selama empat

tahun (Tahun 7 hingga Tahun 10) atau lima tahun (Tahun 7 hingga Tahun 11), sebelum mengikuti ujian BC GCE Peringkat 'O' atau kelulusan yang setara. Namun, semua pelajar akan mengikuti kurikulum yang sama selama dua tahun pertama (Tahun 7 dan Tahun 8). Setelah Tahun 8, pelajar akan diarahkan untuk mengikuti salah satu dari program berikut:

- a. Program Pendidikan Menengah Umum (Tahun 9 hingga 10 atau Tahun 9 hingga 11)
- b. Program Pendidikan Menengah Terapan (Tahun 9 hingga 11) .

Terdapat perubahan dalam penggunaan istilah 'darjah' dan 'menengah' yang diubah menjadi 'tahun', seperti Tahun 1-6 menggantikan Darjah 1-6, dan Tahun 7-11 menggantikan Menengah 1-5. Perubahan ini disesuaikan dengan durasi dan jangka waktu persekolahan, yaitu minimal dua belas tahun.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam durasi dan jangka waktu persekolahan setelah Menengah 3. Dalam sistem lama, berdasarkan hasil Menengah 3, pelajar melanjutkan ke Menengah 4 dan Menengah 5. Dalam sistem baru SPN21, berdasarkan hasil Menengah 3, pelajar ditawarkan untuk mengikuti Menengah 4 selama satu tahun (Tahun 10) dan mengikuti ujian BC GCE Peringkat 'O' pada tahun yang sama, atau mengikuti Menengah 4 selama dua tahun (Tahun 10 dan Tahun 11), dengan ujian BC GCE Peringkat 'O' pada Tahun 11. Ujian BC GCE Peringkat 'O' (Brunei-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level) adalah ujian standar internasional yang diadakan di Brunei Darussalam bekerja sama dengan Cambridge Assessment International Education, bagian dari University of Cambridge, Inggris.

Dengan kata lain, SPN21 fokus membantu pelajar menentukan arah masa depan mereka setelah Menengah 3. Penetapan tujuan ini dapat dipersiapkan sejak Tahun 7. Oleh karena itu, SPN21 bukan hanya sistem semata, tetapi juga mengintegrasikan pemikiran 'siap siaga' untuk masa depan pelajar dalam bentuk alternatif. Pelajar, orang tua, dan tenaga pengajar perlu diberikan pemahaman tentang niat tulus Kementerian Pendidikan sebagai lembaga yang menitikberatkan pendidikan dan masa depan generasi muda, sejalan dengan Wawasan 2035. (Masuriyati & Che Zarrina, 2015)

Dengan adanya pemahaman bersama antara pelajar, orang tua, dan tenaga pengajar, akan memudahkan terjalannya kerja sama antara mereka dengan pihak kementerian, yang sangat membantu dalam mencapai tujuan Kementerian Pendidikan berdasarkan rencana strategis yang telah disusun.

## **7. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Negara Brunei Darussalam**

Pendidikan Islam di Brunei Darussalam dirancang untuk membentuk individu Muslim yang taat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Seiring dengan perkembangan ini, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan sekolah Islam terpadu mulai bermunculan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat di Asia Tenggara, dengan masing-masing negara mengadaptasi sistem pendidikan Islam sesuai konteks lokalnya. (Asbol bin Mail, Brahim & Tassim, 2019)

Di Brunei Darussalam, sistem pendidikan tradisional dikenal sebagai "Balai", yang menyediakan dua jenis pengajaran: umum dan khusus. Balai berfungsi sebagai tempat belajar bagi anak-anak, dengan pengajaran umum terbuka untuk semua masyarakat tanpa batasan sosial atau usia. Sementara itu, pengajaran khusus ditujukan

bagi kelompok tertentu seperti pegawai agama, ulama, kadhi, dan juru nikah. Namun, sistem ini awalnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sementara perempuan menerima pendidikan di rumah.

Meskipun sistem pendidikan informal di masjid, balai, dan tempat lainnya masih berlangsung, Brunei Darussalam telah mengalami transisi menuju sistem pendidikan formal yang diatur oleh pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam formal seperti sekolah Arab, sekolah agama, tahfizul Quran, dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah didirikan dan dikelola oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama serta Universitas Brunei Darussalam.

Pemerintah Brunei Darussalam memberikan perhatian besar terhadap pendidikan agama, dengan dukungan langsung dari Sultan sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam terus berkembang dalam hal infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan agama di negara tersebut. (Asbol bin Mail, Brahim & Tassim, 2019)

Sistem kurikulum di Brunei Darussalam mengikuti model yang berfokus pada mata pelajaran, dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, berkisar antara 7 hingga 9 mata pelajaran. Di tingkat pra-universitas, terdapat 12 jurusan yang ditawarkan. Dalam perkembangan kurikulum saat ini, lembaga pendidikan profesi telah mengembangkan bahan kajian yang berkaitan dengan standar kualifikasi kerja (kompetensi) yang penting bagi tuntutan dunia usaha. Hasil pengembangan tersebut saat ini diimplementasikan dalam lembaga pendidikan profesi, yang dikendalikan bersama oleh sekolah dan dunia usaha. (Novidya Yulanda, 2019)

Menariknya, bahasa Inggris diajarkan dari taman kanak-kanak hingga kelas 1-3 sekolah dasar. Penggunaan dwibahasa mulai dari sekolah menengah (kelas 4-6 sampai SMA), namun beberapa mata pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Melayu, seperti pelajaran agama Islam, seni dan kerajinan, dan Melayu Islam Berjaya (MIB). Di sisi lain, matematika, sejarah, sains, dan geografi diajarkan dalam bahasa Inggris. (Jones, G. M., 2015).

Pendidikan di Brunei Darussalam memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan sistem pendidikan, termasuk:

- a. Pendidikan Gratis: Pemerintah menyediakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis bagi semua warga negara Brunei.
- b. Kurikulum Nasional: Brunei memiliki kurikulum nasional yang mencakup berbagai mata pelajaran, termasuk bahasa, sains, matematika, dan studi Islam.
- c. Peningkatan Kualitas Pengajaran: Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan infrastruktur pendidikan.
- d. Pendidikan Teknologi dan Informatika: Pemerintah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital.
- e. Pendidikan Agama: Pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah untuk memastikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.
- f. Pendidikan Tinggi: Brunei memiliki Universitas Brunei Darussalam (UBD) dan

- Institut Teknologi Brunei (ITB) sebagai lembaga pendidikan tinggi utama.
- g. Pendidikan Kejuruan: Pengembangan pendidikan kejuruan difokuskan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja.
  - h. Pendidikan Kepemudaan dan Pengembangan Karakter: Program ekstrakurikuler dan kegiatan di luar kelas diselenggarakan untuk mengembangkan kepemimpinan, keterampilan sosial, dan nilai-nilai positif pada siswa. (Alfathon, S., Mislaini, & Fajri, K., 2024)

## KESIMPULAN

Reformasi kurikulum pendidikan di Brunei Darussalam merupakan langkah strategis dalam mewujudkan *Brunei Vision 2035*. Integrasi nilai-nilai MIB, penguatan kompetensi guru, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci keberhasilan reformasi ini. Rekomendasi meliputi peningkatan investasi dalam pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan masa depan, dan penguatan sistem evaluasi pendidikan.

Penyelenggaraan dan pengaturan pendidikan Islam, termasuk struktur kurikulumnya, sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas pemerintah Brunei Darussalam. Dalam merancang kurikulum pendidikan Islam, pemerintah menetapkan tiga pilar utama sebagai fondasi: penerapan sistem bilingual di seluruh institusi pendidikan, integrasi nilai-nilai Melayu Islam Beraja (MIB) ke dalam materi pelajaran, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan. Dedikasi dan kehendak politik pemerintah dalam memajukan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam, sangat kuat dan konsisten. Setiap tingkat pendidikan diwajibkan mengusung nilai-nilai keagamaan sebagai inti proses pembelajaran. Di sisi lain, dukungan finansial yang stabil dari kekayaan alam negara menjadi elemen kunci yang memungkinkan kebijakan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam di Brunei berjalan efektif dan berkelanjutan.

Reformasi kurikulum di Brunei bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Indonesia perlu memperkuat pendidikan berbasis keterampilan dan karakter, serta mulai menerapkan kurikulum dwibahasa agar lulusan siap bersaing secara global. Kerja sama antara sekolah dan dunia kerja juga penting untuk mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah perlu memastikan kualitas pendidikan merata, termasuk di daerah terpencil, agar semua anak Indonesia mendapat kesempatan yang sama menuju masa depan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfathon, S., Mislaini, & Fajri, K. (2024). "Perkembangan Sistem Pendidikan di Brunei Darussalam". *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114-130.
- Amran Khaidir Fadil, Suhendra. (2023). "Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-Negara Asean Dalam Mendukung Sustainable Developments Goal". *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 5. No. 1.
- Asbol bin Mail, Brahim & Tassim. (2019). "History and Development of Islamic Education in Brunei Darussalam". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. Vol. 5. No. 2.



- Aslan, A., & Suhari, S. (2019). Sejarah Kurikulum Pendidikan Islam di Brunei Darussalam. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(1), 113–127.
- Athoillah & Afina Aninnas. (2020). “Zakat and Tax Relations in Muslim Southeast Asian Countries ( Comparative Study of Zakat and Tax Arrangements in Indonesia)”. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 4. No. 2.
- Hasbi Abduh. (2016). “Perbandingan Pendidikan Di Negara Brunei Darussalam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 5. No. 1.
- Ika Kurnia Sofiani, dkk. (2024) “Analisis Sistem, Problematika dan Kebijakan Pendidikan di Brunei Darussalam Serta Perbandingan dengan Pendidikan di Indonesia”. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 1 No. 3.
- Jones, G. M. (2015). “Bilingual and Multilingual Education in Brunei and Malaysia”. *The Handbook of Bilingual and Multilingual Education*. 531-541.
- Masuriyati & Che Zarrina. (2015). *Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21 Brunei Darussalam dalam Melestari Ketamadunan Islam Negara Zikir: Cabaran dan Harapan*. Afkar, 16, 61-92
- Maunah, Binti. (2018). *Perbandingan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Muhammad Yusran. (2019). “Kurikulum Pendidikan Islam Di Thailand dan Brunei Darussalam”. *Jurnal Al-Risalah*. Vol. 15. No. 1.
- Muhd. Abdul Afiq & Mahayuddin. (2018). “Falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) Beracuankan Islam Melalui Teori ‘Umran”. *International Journal of `Umranic Studies Jurnal Antarabangsa Kajian `Umran*. Vol.1, Issue 1.
- Novidya Yulanda. (2019). “Perbandingan Kurikulum Social Studies di Korea Selatan dan Brunei Darussalam”, *Research and Development Journal Of Education*, 5.2 (2019), 26–38
- Pawiro, S.A. (2021) “Brunei Vision 2035: a National Narrative of Modernity in Traditional Normativity,” *International Review of Humanities Studies*, 6(2)
- Sulthoni Alfathon, dkk. (2025) “Perkembangan Sistem Pendidikan di Brunei Darussalam”. *Jurnal Sadewa*. Vol. 3, No. 1.
- Syukron Darsyah (2023) “Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 5.
- Wasiah dan Fitri (2022) “Pendidikan Islam di Brunei Darussalam,” *Adiba: Journal of Education*. Vol. 2, No. 1.